

**Laporan Data Pengaduan**  
**Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan**  
**Januari 2016**

Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 265 berkas

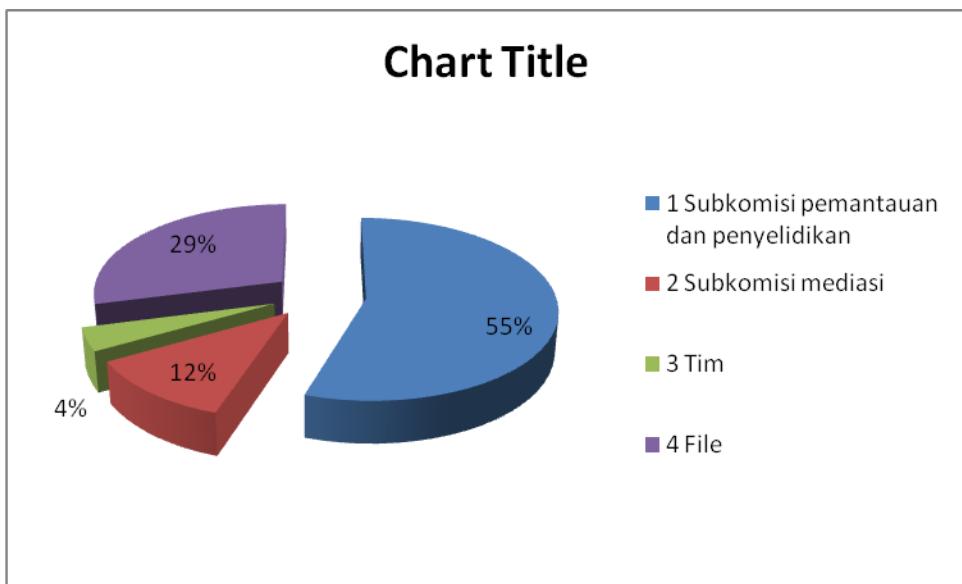
Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	1	20	Kalimantan Barat	2
2	Sumatera Utara	23	21	Kalimantan Tengah	0
3	Bengkulu	1	22	Kalimantan Selatan	3
4	Jambi	1	23	Kalimantan Timur	4
5	Riau	9	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	12	25	Gorontalo	0
7	Sumatera Selatan	6	26	Sulawesi Selatan	9
8	Lampung	3	27	Sulawesi Tenggara	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	28	Sulawesi Tengah	6
10	Kepulauan Riau	6	29	Sulawesi Utara	0
11	Banten	6	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	25	31	Maluku	5
13	DKI Jakarta	85	32	Maluku Utara	1
14	Jawa Tengah	9	33	Papua	3
15	Jawa Timur	19	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	35	Tanpa Alamat	11
17	Bali	0			
18	Nusa Tenggara Barat	4			
19	Nusa Tenggara Timur	4			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	146
2	Subkomisi mediasi	31
3	Tim 65	11
4	Tim	0
5	File	77
Jumlah		265



3. Jenis berkas pengaduan

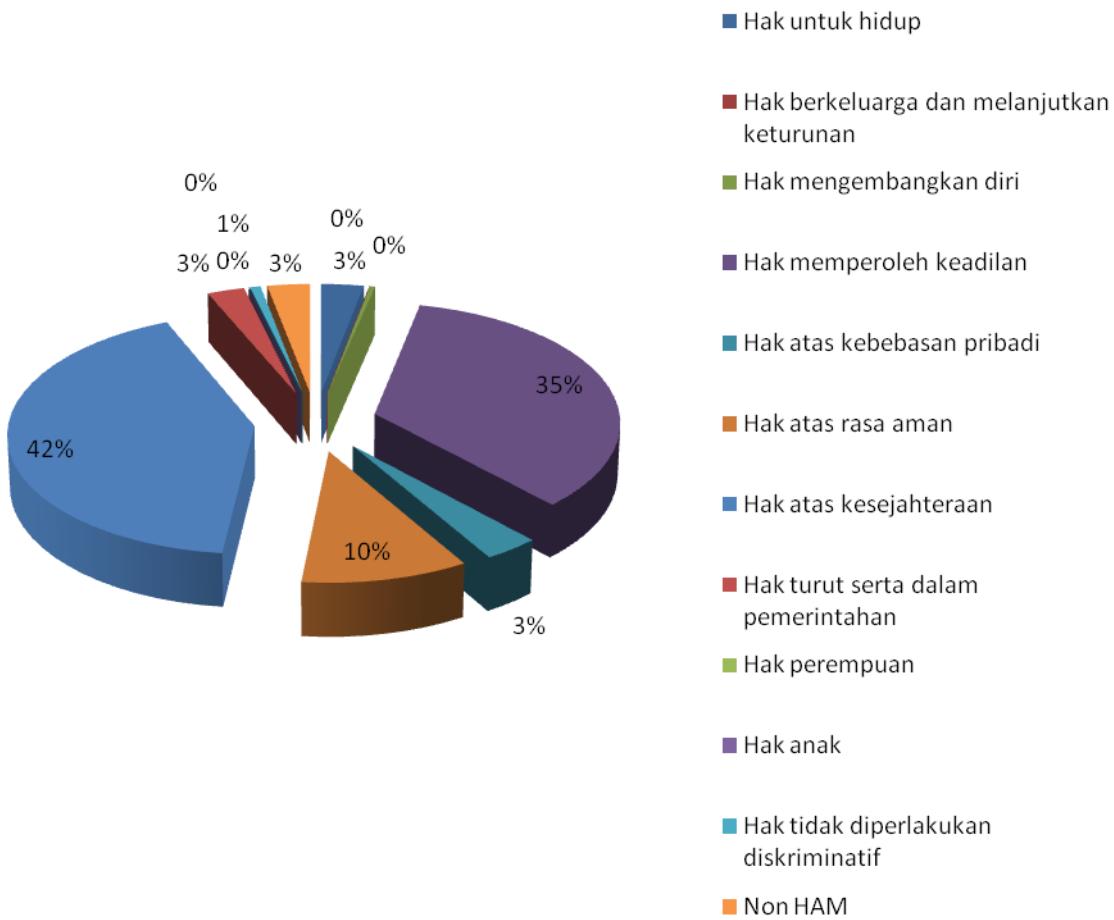
No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	136
2	Tembusan	129
3	Tidak ditujukan Ke KH	0
Jumlah		265

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	45
2	Pos	194
3	Fax	7
4	Email	12
5	Audiensi	6
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	1
Jumlah		265

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	8
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	1
4	Hak memperoleh keadilan	92
5	Hak atas kebebasan pribadi	9
6	Hak atas rasa aman	27
7	Hak atas kesejahteraan	111
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	7
9	Hak perempuan	0
10	Hak anak	0
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	8
Jumlah		265



#### 4.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	2
Lingkungan hidup	6
	8
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	1
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0

	1
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	76
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	5
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	6
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	4
	91
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	2
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
	9
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	2
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	11
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	2
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	4
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	8
	27
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	7
Hak atas kepemilikan tanah	45
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	22
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	10
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	23
Hak atas kesehatan	0
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	0
	107
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	4
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2

	7
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	0
	0
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
	0
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	2
	2
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	13

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	129
2	Individu - Anak	4
3	Individu - Perempuan	7
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja / profesi	8
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	0
12	Individu - Lansia	0

13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	84
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	12
19	Kelompok - Masyarakat adat	7
20	Kelompok - Ras dan etnis	0
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	2
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	0
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	2
28	Warga negara asing	0
29	Korporasi	2
30	Lembaga Pendidikan	1
31	Polri	2
32	Tidak ada	2

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	30
2	Pemerintah daerah	40
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (Non kementerian)	6
5	Lembaga peradilan	7
6	Kepolisian	84
7	TNI	10
8	Kejaksaan	7
9	Lembaga pemasarakatan dan / atau Rutan	4
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	42
12	BUMN / BUMD	20

13	Lembaga pelayanan kesehatan	0
14	Lembaga pendidikan	0
15	Organisasi	0
16	Individu - Orang seorang	3
17	Individu - Pekerja / profesi	2
18	Kelompok - Masyarakat	2
19	Kelompok - Masyarakat adat	3
20	Kelompok – Ras dan Etnis	1
21	Kelompok - Pekerja	0
22	Organisasi	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	2

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Pada Januari 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (iii) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
50	40	17	107

Jakarta, 1 Februari 2016

**Laporan Data Pengaduan Bulan Februari 2016**  
**Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan**

Dari tanggal 1 Februari sampai dengan 26 Februari 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 265 berkas.

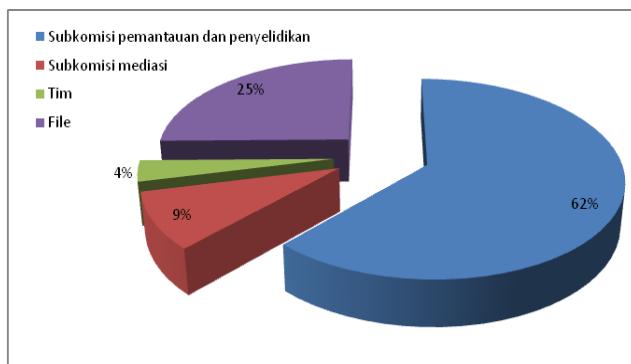
Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas	No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas
1	Aceh	5	18	Nusa Tenggara Barat	2
2	Sumatera Utara	23	19	Nusa Tenggara Timur	3
3	Bengkulu	1	20	Kalimantan Barat	2
4	Jambi	7	21	Kalimantan Selatan	3
5	Riau	5	22	Kalimantan Tengah	1
6	Sumatera Barat	7	23	Kalimantan Timur	4
7	Sumatera Selatan	6	24	Kalimantan Utara	
8	Lampung	6	25	Gorontalo	1
9	Kepulauan Bangka Belitung		26	Sulawesi Selatan	10
10	Kepulauan Riau	6	27	Sulawesi Tenggara	2
11	Banten	6	28	Sulawesi Tengah	5
12	Jawa Barat	29	29	Sulawesi Utara	
13	DKI Jakarta	122	30	Sulawesi Barat	
14	Jawa Tengah	18	31	Maluku	10
15	Jawa Timur	22	32	Maluku Utara	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	7	33	Papua	4
17	Bali	1	34	Papua Barat	3
			35	Pakistan	1
			36	Swiss	1
			37	Tiongkok	1
			38	Tanpa alamat jelas	20

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	214
2	Subkomisi mediasi	32
3	Tim	12
4	File	87
	Jumlah	345



3. Jenis berkas pengaduan<sup>1</sup>

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	241
2	Tembusan	100
	Jumlah	341

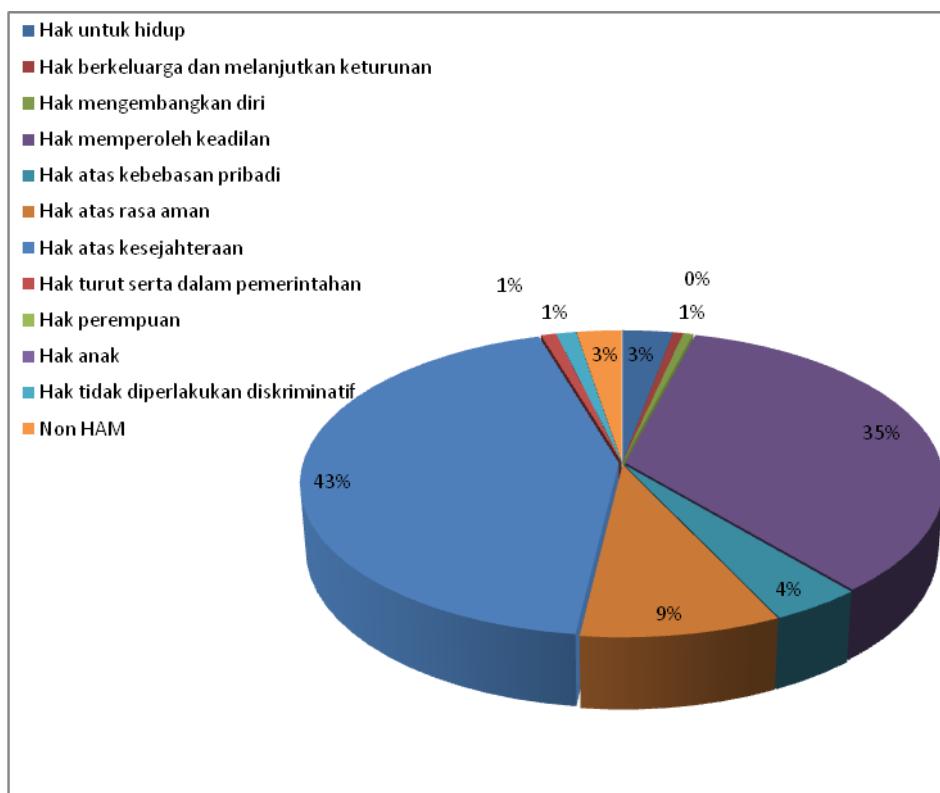
4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	79
2	Pos	212
3	Fax	8
4	Email	25
5	Audiensi	6
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	15
	Jumlah	345

<sup>1</sup> Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 berkas tidak disertai kejelasan jenis suratnya

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	10
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
3	Hak mengembangkan diri	2
4	Hak memperoleh keadilan	120
5	Hak atas kebebasan pribadi	14
6	Hak atas rasa aman	31
7	Hak atas kesejahteraan	150
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	4
12	Non HAM	9
Jumlah		345



#### 4.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	3
Lingkungan hidup	7
	10
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
	2
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	1
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	2
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	89
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	8
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	22
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	1
	120
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	2
Berkumpul, berapat, dan berserikat	1
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	1
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	4
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
	14
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	9
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	10
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	6
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	3
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	2
	30
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	15
Hak atas kepemilikan tanah	46

Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	36
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	10
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	36
Hak atas kesehatan	2
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	1
	146
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	1
	3
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	0
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	5
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	3
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	1
	10
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	2
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	2
	4

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	170
2	Individu - Anak	3
3	Individu - Perempuan	8
4	Individu - Buruh migran	
5	Individu - Pekerja / profesi	6

6	Individu - Suku	
7	Individu - Ras dan etnis	
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - Penyandang disabilitas	
10	Individu - Teroris	
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	7
12	Individu - Lansia	
13	Individu - Fakir miskin	1
14	Kelompok - Masyarakat	86
15	Kelompok - Anak-anak	
16	Kelompok - Perempuan	
17	Kelompok - Buruh migran	1
18	Kelompok - Pekerja / profesi	25
19	Kelompok - Masyarakat adat	7
20	Kelompok - Ras dan etnis	2
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	4
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Teroris	
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	
27	Organisasi	5
28	Warga negara asing	2

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	31
2	Pemerintah daerah	45
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (Non kementerian)	6
5	Lembaga peradilan	20
6	Kepolisian	99

7	TNI	16
8	Kejaksaan	12
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	2
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	60
12	BUMN / BUMD	23
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	5
15	Organisasi	1

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Pada Februari 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, (b) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>3</sup>, dan (c) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Bukan Pelanggaran HAM	Kelengkapan Berkas	Ucapan terima kasih	
69	33	17	119

Jakarta, 29 Februari 2016

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

<sup>3</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

**Laporan Data Pengaduan**  
**Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan**  
**Maret 2016**

Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 614 berkas

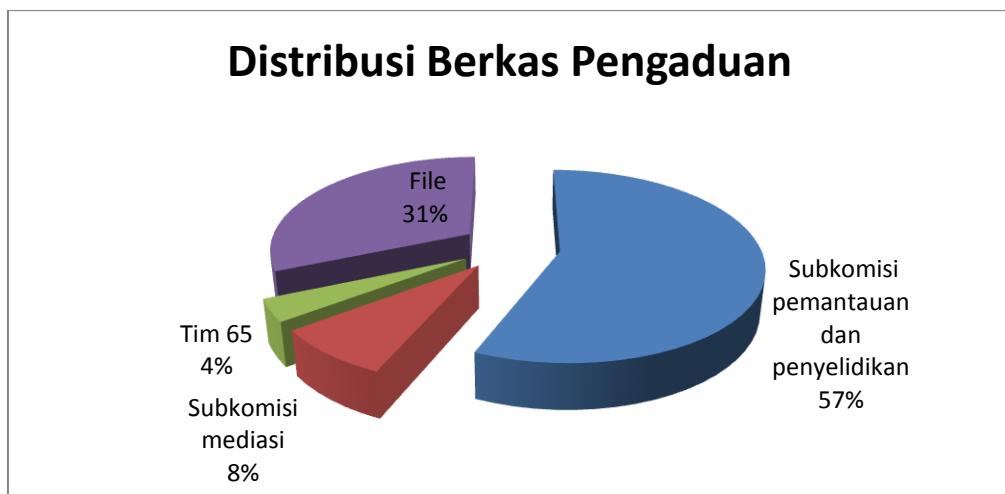
Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	8	20	Kalimantan Barat	8
2	Sumatera Utara	50	21	Kalimantan Selatan	7
3	Bengkulu	2	22	Kalimantan Tengah	1
4	Jambi	11	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	17	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	19	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	13	26	Sulawesi Selatan	29
8	Lampung	11	27	Sulawesi Tenggara	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	28	Sulawesi Tengah	15
10	Kepulauan Riau	5	29	Sulawesi Utara	7
11	Banten	17	30	Sulawesi Selatan Barat	1
12	Jawa Barat	47	31	Maluku	21
13	DKI Jakarta	154	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	25	33	Papua	12
15	Jawa Timur	61	34	Papua Barat	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	11	35	Tanpa Alamat	19
17	Bali	9			
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	10			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1		347
2	Subkomisi mediasi	51
3	Tim 65	23
5	File	193
Jumlah		614



3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	345
2	Tembusan	262
3	Tidak ditujukan/ ditembusukan Ke KH	7
Jumlah		614

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	90
2	Pos	467
3	Fax	14
4	Email	32
5	Audiensi	4
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	7
Jumlah		614

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	18
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	5
3	Hak mengembangkan diri	6
4	Hak memperoleh keadilan	231
5	Hak atas kebebasan pribadi	14
6	Hak atas rasa aman	54
7	Hak atas kesejahteraan	238
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	11
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	1
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	33
Jumlah		614

4.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	6
Lingkungan hidup	12
	18
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	5
	5
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	6
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
	6
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	172
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	13
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	38
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	8
	231
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	4

Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	2
	14
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	15
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	13
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	4
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	9
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
	52
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	18
Hak atas kepemilikan tanah	98
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	38
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	22
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	47
Hak atas kesehatan	8
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	5
	236
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	8
	11
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	0
	2
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>

Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
	1
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	37

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	319
2	Individu - Anak	7
3	Individu - Perempuan	10
4	Individu - Buruh migran	4
5	Individu - Pekerja / profesi	14
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	9
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	153
15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	30
19	Kelompok - Masyarakat adat	10
20	Kelompok - Ras dan etnis	0
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	2
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	3
28	Warga negara asing	3
29	Korporasi	7

30	Lembaga Pendidikan	2
31	Polri	0
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	30

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	68
2	Pemerintah daerah	95
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (Non kementerian)	16
5	Lembaga peradilan	34
6	Kepolisian	186
7	TNI	22
8	Kejaksaan	22
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	2
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	73
12	BUMN / BUMD	29
13	Lembaga pelayanan kesehatan	0
14	Lembaga pendidikan	8
15	Organisasi	7
16	Individu - Orang seorang	8
17	Individu - Pekerja / profesi	3
18	Kelompok - Masyarakat	1
19	Kelompok - Masyarakat adat	0
20	Kelompok – Ras dan Etnis	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	38

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Pada Maret 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
67	108	6	181

Jakarta, 31 Maret 2016

Putu Sri

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

**Laporan Data Pengaduan**  
**Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan**  
**April 2016**

Dari tanggal 1 April sampai dengan 28 April 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 606 berkas

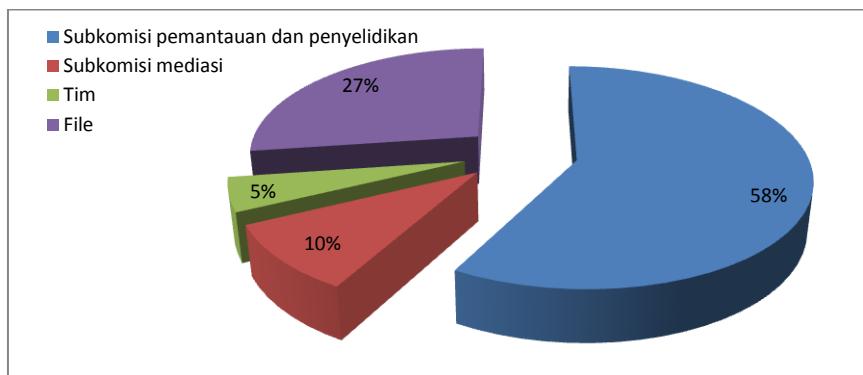
Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas	No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas
1	Aceh	15	18	Nusa Tenggara Barat	3
2	Sumatera Utara	63	19	Nusa Tenggara Timur	9
3	Bengkulu	1	20	Kalimantan Barat	3
4	Jambi	6	21	Kalimantan Selatan	3
5	Riau	14	22	Kalimantan Tengah	7
6	Sumatera Barat	29	23	Kalimantan Timur	6
7	Sumatera Selatan	18	24	Kalimantan Utara	
8	Lampung	8	25	Gorontalo	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	26	Sulawesi Selatan	19
10	Kepulauan Riau	10	27	Sulawesi Tenggara	2
11	Banten	13	28	Sulawesi Tengah	8
12	Jawa Barat	66	29	Sulawesi Utara	8
13	DKI Jakarta	153	30	Sulawesi Barat	
14	Jawa Tengah	27	31	Maluku	7
15	Jawa Timur	53	32	Maluku Utara	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	33	Papua	4
17	Bali	2	34	Papua Barat	2
			35	Hongkong	1
			36	Tanpa alamat jelas	28

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	352
2	Subkomisi mediasi	59
3	Tim	30
4	File	165
	Jumlah	606



3. Jenis berkas pengaduan

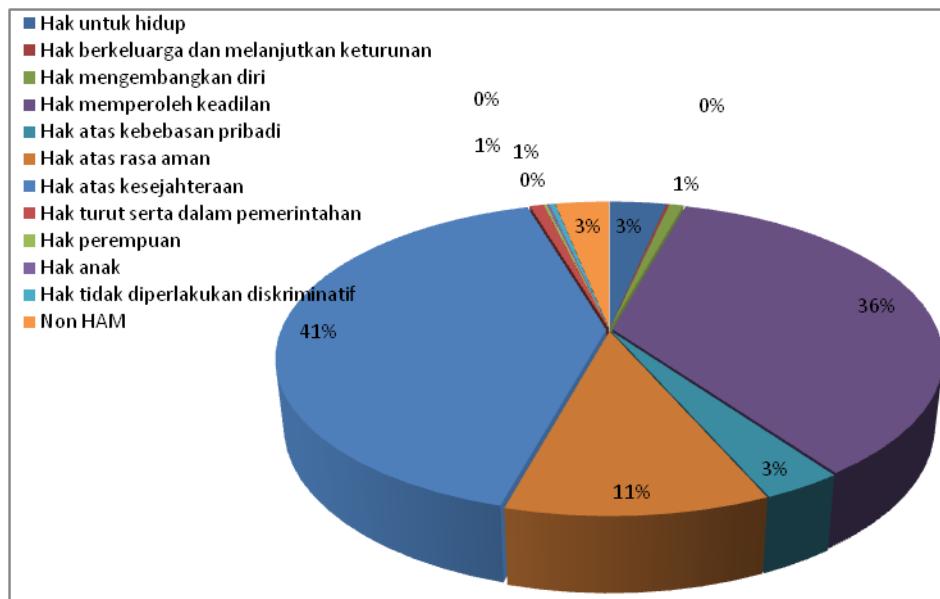
No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	351
2	Tembusan	254
3	Tidak ditujukan langsung atau tembusan ke Komnas HAM	1
	Jumlah	606

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	113
2	Pos	414
3	Fax	16
4	Email	39
5	Audiensi	12
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	12
	Jumlah	606

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	20
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	217
5	Hak atas kebebasan pribadi	20
6	Hak atas rasa aman	66
7	Hak atas kesejahteraan	249
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	5
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	1
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	19
Jumlah		606



### 4.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	10
Lingkungan hidup	10
	20
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
	1
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5

Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
	5
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	163
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaaan	11
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	38
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
	215
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	13
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	2
	20
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	16
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	18
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	11
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	10
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
	65
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	17
Hak atas kepemilikan tanah	82
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	53
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	23
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	49
Hak atas kesehatan	17
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	7
	248
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	

Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2
	5
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
	1
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	1
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
	2

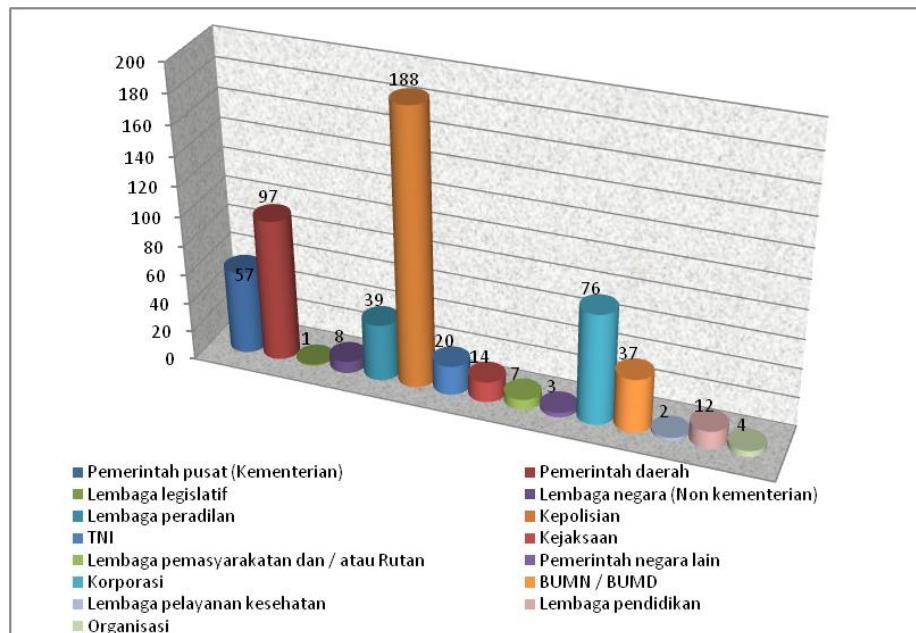
## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	302
2	Individu - Anak	10
3	Individu - Perempuan	19
4	Individu - Buruh migran	5
5	Individu - Pekerja / profesi	20
6	Individu - Suku	4
7	Individu - Ras dan etnis	
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - Penyandang disabilitas	1
10	Individu - Teroris	
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	12
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	
14	Kelompok - Masyarakat	142
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh migran	3
18	Kelompok - Pekerja / profesi	33
19	Kelompok - Masyarakat adat	5

20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	10
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	
23	Kelompok - LGBT	
24	Kelompok - Teroris	
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	5
26	Kelompok - Lansia	
27	Organisasi	5
28	Warga negara asing	

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	57
2	Pemerintah daerah	97
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (Non kementerian)	8
5	Lembaga peradilan	39
6	Kepolisian	188
7	TNI	20
8	Kejaksaan	14
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	7
10	Pemerintah negara lain	3
11	Korporasi	76
12	BUMN / BUMD	37
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	12
15	Organisasi	4



8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Pada April 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
15	27	4	46

Jakarta, 29 April 2016

Desiderius Ryan

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN MEI 2016**

#### **Pendahuluan**

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM baik itu dalam pengkajian dan penelitian, peyuluhan, pemantauan dan mediasi, Komnas HAM juga berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **977 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

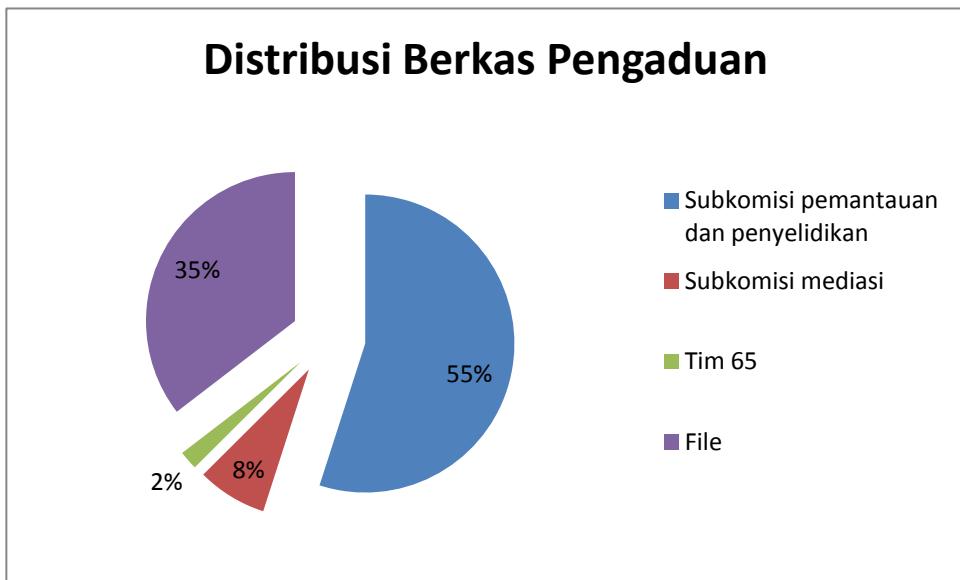
##### **1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	9	20	Kalimantan Barat	6
2	Sumatera Utara	92	21	Kalimantan Selatan	5

3	Bengkulu	7	22	Kalimantan Tengah	12
4	Jambi	15	23	Kalimantan Timur	12
5	Riau	34	24	Kalimantan Utara	2
6	Sumatera Barat	59	25	Gorontalo	8
7	Sumatera Selatan	28	26	Sulawesi Selatan	37
8	Lampung	10	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	28	Sulawesi Tengah	33
10	Kepulauan Riau	10	29	Sulawesi Utara	9
11	Banten	26	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	60	31	Maluku	36
13	DKI Jakarta	234	32	Maluku Utara	0
14	Jawa Tengah	53	33	Papua	3
15	Jawa Timur	93	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	35	Tanpa Alamat	28
17	Bali	8			
18	Nusa Tenggara Barat	12			
19	Nusa Tenggara Timur	14			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	537
2	Subkomisi mediasi	74
3	Tim 65	20
5	File	346
Jumlah		977



### 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	466
2	Tembusan	506
3	Tidak ditujukan/ ditembusukan Ke KH	5
Jumlah		977

### 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	111
2	Pos	809
3	Fax	11
4	Email	32
5	Audiensi	1
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	13
Jumlah		977

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	26
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
3	Hak mengembangkan diri	16
4	Hak memperoleh keadilan	380
5	Hak atas kebebasan pribadi	24
6	Hak atas rasa aman	69
7	Hak atas kesejahteraan	382
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	5
10	Hak anak	4
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	59
Jumlah		977

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	17
Jumlah	26
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
Jumlah	1
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	11
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh	4

manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
Jumlah	15
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	289
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	23
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	59
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	5
Jumlah	376
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	2
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	12
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	2
Bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	3
Jumlah	23
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	8
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	9
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	16

Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	24
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	12
Jumlah	69
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	36
Hak atas kepemilikan tanah	149
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	74
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	31
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	76
Hak atas kesehatan	13
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	382
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	5
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2
Jumlah	8
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0

Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	1
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	5
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	3
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	2
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	66

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	499
2	Individu - Anak	18
3	Individu - Perempuan	39
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	34
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0

8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	1
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	237
15	Kelompok - Anak-anak	4
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	29
19	Kelompok - Masyarakat adat	19
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	8
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
26	Kelompok - Lansia	1
27	Organisasi	3
28	Warga negara asing	1
29	Korporasi	7
30	Lembaga Pendidikan	2
31	Polri	1
32	Lembaga Peradilan	1
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	50

## **7. Klasifikasi pihak yang diadukan**

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	76
2	Pemerintah daerah	140
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	14
5	Lembaga peradilan	66
6	Kepolisian	321
7	TNI	41
8	Kejaksaan	26
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	6
10	Pemerintah negara lain	0
11	Korporasi	133
12	BUMN / BUMD	53
13	Lembaga pelayanan kesehatan	3
14	Lembaga pendidikan	12
15	Organisasi	7
16	Individu - Orang seorang	11
17	Individu - Pekerja / profesi	5
18	Kelompok - Masyarakat	6
19	Kelompok - Masyarakat adat	1
20	Individu – Perempuan	3
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	53

## **8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Pada Mei 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun

1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
61	133	17	211

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

#### **B. Laporan Penerimaan Audiensi**

Pada 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan menerima pengaduan audiensi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penghilangan suara pemilih masyarakat adat Kampung Moyeba Distrik Muskono Utara Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat saat Pilkada Teluk Bintuni oleh putusan MK

Pada Selasa, 17 Mei 2016 Komnas HAM yang diwakili oleh Komisioner Nur Khoiron dan Analis Pengaduan Nisa Arralinar menerima pengaduan dari Decky Ovide dan Johanis. Pengadu adalah ketua dari Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Adat Papua an. Decky Ovide dan Johanis yang merupakan calon wakil bupati pasangan 3 dalam Pilkada Bupati Teluk Bintuni pada 9 Desember 2015. Pengadu mempersoalkan penihilan suara pemilih di TPS Moyeba Distrik Muskano Utara Kab. Teluk Bintuni oleh Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIV/2016. Pengadu beranggapan MK tidak menilai sistem penentuan suara melalui sistem noken yang dilakukan oleh masyarakat adat di Papua. Bahwa penghapusan suara

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

masyarakat Kampung Moyeba oleh MK menyakiti hati masyarakat. Pengadu Meminta Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi terkait penghilangan hak konstitusi warga. Berkas Pengaduan diterima dengan nomor agenda 109.420.

2. Permohonan kepastian hukum atas penanganan kasus pidana Bupati Ngada an. Marianus Sae terkait pemblokiran Bandara Turelelo-Soa pada 21 Desember 2013

Pada kamis, 26 Mei 2016 Komnas HAM yang diwakili oleh Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Johan Efendi, Analis Pengaduan Nisa Arralinar dan Pemantau Aktifitas HAM Dyah Nan menerima pengaduan dari FORMADDA NTT dan Forum Masyarakat Ngada. Pada intinya Pengadu menyampaikan kasus pemblokiran Bandara Turelelo-Soa oleh Bupati Ngada an. Marianus Sae pada 21 Desember 2016 saat ini ditangai oleh Polda NTT dan PPNS Kementerian Perhubungan. Bupati Ngada an. Marianus Sae diduga sebagai aktor intelektual dalam perkara tersebut, dimana yang bersangkutan memerintahkan 23 Satpol PP untuk memblokir Bandara Turelelo-Soa. Saat ini ke-23 Satpol PP telah menjalani proses pidana dengan status tersangka dan proses terakhir sedang mengajukan kasasi di MA. Bupati Ngada an. Marianus Sae berstatus tersangka, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut penanganannya oleh Polda NTT. Pengadu tidak mempunyai bukti lapor kepolisian karena kasus tersebut langsung diambil alih oleh pihak Polda NTT. Pengadu meminta Komnas HAM untuk mendorong Polda NTT untuk segera menangani kasus tersebut dan memanggil para pihak terkait, seperti Polda NTT, Kementerian Perhubungan dan Bupati Ngada. Pada kesempatan ini Pengadu tidak menyerahkan berkas.

3. Permohonan perlindungan atas rencana penggusuran Kampung Nelayan di Kampung Baru Kec. Kosambi Desa Dadap Kab. Tangerang oleh Pemkab Tangerang terkait program pemerintah Indonesia Bebas Prostitusi

Pada Rabu, 11 Mei 2016 Komnas HAM yang diwakili oleh Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Komediator Yulia Pasha dan Analis Pengaduan Nisa Arralinar menerima pengaduan dari Dari Kampung Dadap an. Izul, dkk. Pada intinya pengadu menyampaikan bahwa warga menempati lahan tersebut sejak 1975, sebagian warga merupakan korban

penggusuran Muara Karang pada saat itu. Warga memiliki bukti kepemilikan berupa SHM dan girik, serta setiap tahunnya warga membayar PBB.Pada 14 Maret 2016 Bupati Tangerang mengundang warga untuk rapat sosialisasi penertiban lokalisasi, diruang rapat dijaga ± 500 anggota TNI/Polri.Menurut pemaparan Sekda, wilayah tersebut akan dibangun rusun, *Islamic Center*, sekolah bertaraf internasional, dan pusat kuliner.Tim pendataan melakukan pendataan dengan didampingi oleh Satpol PP dan TNI/Polri yang mengintimidasi warga, sehingga 6 (enam) warga meninggal akibat ketakutan.Setiap malam polisi melakukan patroli yang mengakibatkan warga menjadi tidak tenang dan setiap warga berkumpul selalu ada intel.Bupati menjanjikan warga akan direlokasi ke rumah petak/kontrakan gratis yang terletak ± 2 km dari pemukiman warga saat ini. Sebenarnya di rumah petak/kontrakan tersebut sudah berpenghuni namun mereka diusir oleh Pemkab.Pada 10 Mei 2016 Bupati mengeluarkan SP 2 kepada ± 372 KK yang tinggal di sisi depan sampai tepi pantai. Pada saat itu juga terjadi bentrokan antara aparat TNI/Polri dengan warga yang mengakibatkan seorang warga terkena luka tembak, seorang warga terkena peluru gas air mata yang meledak tepat di pelipis sebelah kiri. Terjadi salah tangkap terhadap warga yang bukan merupakan warga asli Kampung Dadap, saat pemeriksaan yang bersangkutan mendapatkan tindak kekerasan dari aparat.Masterplan pembangunan wilayah tersebut tidak menggambarkan tempat tinggal untuk nelayan karena terlalu mewah walaupun berupa kampung deret nelayan.

Pengadu meminta Komnas HAM membantu penyelesaian sengketa lahan tersebut sesuai kewenangan Komnas HAM, mendorong penghentian keterlibatan TNI/Polri dalam penertiban dan menjembatani dialog dengan Bupati guna mencari solusi yang tepat. Pada kesempatan ini, Komnas HAM menerima tambahan barang bukti berupa 6 selongsong gas air mata, 1 selongsong peluru dan 1 proyektil dengan agenda 109.217

#### 4. Ledakan di Ruang Chamber RSAL Minthohardjo

Pada Senin, 9 Mei 2016 Komnas HAM yang diwakili oleh Komisioner Nur Kholis dan Analis Pengaduan Siti Hidayawati menerima pengaduan dari Sdr. Firman Wijaya. Pada intinya Pengadu menyampaikan pada 14 Maret 2016 telah terjadi kebakaran ruang chamber

RSAL Dr. Mintohardjo yang menewaskan Irjen Pol (Purn) Drs. H.R Abubakar Nataprawira,SH, Ir. RM. Edy Suwardi Suryaningrat, dr. Dimas Qadar Radityo dan Dr. Sulistyo. Peristiwa ledakan yang terjadi adalah murni kelalian pihak rumah sakit alam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dengan mengabaikan prosedur pengamanan terapi hiperbarik. Kejadian berwal pada saat salah satu korban (dr. Dimas Qadar) mengeluhkan dan menanyakan kepada suster Winarti mengapa ruang chamber terasa panas tidak seperti biasanya, namun suster tersebut mengabaikan keluhan dari dr. Dimas yang menganggap hanya karena ac kurang dingin. Tidak lama kemudian muncul percikan api di ruang tabung chamber yang berkapasitas 4 orang dan pada saat itu suster Winarti selaku operator ruang tabung chamber tidak melakukan upaya penyelamatan terhadap ke empat pasien yang ada didalamnya, sehingga ketika terjadi kebakaran para pasien tidak dapat diselamatkan. Setelah terjadi ledakan dalam chamber, semua petugas rumah sakit disekitar chamber tidak mengupayakan evakuasi terhadap 4 orang pasien yang ada didalamnya. Tepat disebelah tabung cahmber yang terbakar terdapat ruang tabung chamber yang berkapasitas 10 orang, pada saat kebakaran 8 orang pasien dapat dievakuasi. Sejak peristiwa ledakan terjadi hingga saat ini para korban dan keluarganya tidak mendapatkan atensi dan pertanggung jawaban yang serius dan baik dari pihak manajemen dan pimpinan RSAL Dr. Mintohardjo.

Pihak RSAL Dr. Mintoharjo bersikap sangat arogan, dimana pada saat keluarga korban akan menemui jenayah korban, dihalang-halangi bahkan terjadi peristiwa kekerasan , keluarga dipukul dan didorong ketika akan mengambil jenayah korban. Ketika keluarga korban mengambil barang-barang korban, terdapat beberapa barang yang hilang seperti cincin berlian, kaca mata, dll. Bawa pengusutan peristiwa ini kemudian ditangani oleh Puspomal yang hingga saat ini tidak jelas kemana arah penyelidikan dan belum diketahui apa penyebab pasti terjadinya ledakan. Hingga saat ini keluarga tidak dilibatkan dalam proses penyelidikan yang dilakukan Puspomal.

Pengadu meminta Komnas HAM mengawal proses penyelidikan dari Puspomal dan berkomunikasi dengan pihak KASAL untuk meminta pertanggung jawaban atas peristiwa ini.

### C. Kegiatan Rutin Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan pada 31 Mei 2016
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembukaan Pos Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan di Gunung Sitoli, Nias dengan laporan pelaksaaan sebagai berikut :

Pada 24 – 27 Mei 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan melaksanakan Kegiatan Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Pro Aktif di Kota Gunung Sitoli, Nias. Tim yang bertugas terdiri dari Rima Purnama Salim, AA Rajab, Putu Sri dan Teguh Suprihatin . Rangkaian acara yang dilaksanakan selama kegiatan tersebut adalah :

- a. *Talkshow* di RRI Gunung Sitoli pada 25 Mei 2016. Dalam acara tersebut Tim menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan Komnas HAM, tujuan kegiatan pro aktif di Gunung Sitoli Nias serta mekanisme penerimaan pengaduan di Komnas HAM. Terdapat beberapa pertanyaan dari pendengar antara lain tentang kasus- kasus apa saja yang bisa dilaporkan kepada Komnas HAM, penanganan pengaduan di Komnas HAM,dan lain- lain
- b. Pembukaan Pos Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Komnas HAM yang bertempat di Kantor LBH Yaahowu yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 283 Kel. Ilir, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli pada 25 Mei 2016. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa konsultasi dan pengaduan yang disampaikan mengenai :
  - b.1. Sdr. Samanto Haribuan Zibua mengadukan lambannya tindak lanjut dari pihak kepolisian dalam penanganan suatu tindak pidana. Pengadu belum menyampaikan berkas pengaduan. Tim menyarakan untuk melaporkan kinerja kepolisian kepada Kabid. Propam Polda Sumatera Utara dan Kompolnas.
  - b.2. Sdr. Famachoi Wa'o menanyakan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan agenda 101.568. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas rekomendasi Komnas HAM. Berkas pengaduan diterima dengan agenda 109.453

- b.3. Sdr. Pendeta Lase, menyampaikan permohonan amicus curiae atas pengajuan Peninjauan Kembali perkara bading No. 06/Pdt.G/2012/PN. GS. Kasus ini sebelumnya telah ditangani Komnas HAM. Berkas diterima dengan agenda 109.456
- c. FGD bertempat di Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias yang beralamat di Jl. Makam Pahlawan, Desa Mudik, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli pada 26 Mei 2016. Acara FGD bertemakan “Peta Sosial Masyarakat Gunung Sitoli dan Wilayah Sekitarnya” dengan narasumber Rima Purnama Salim, AA Rajab dan Putu Sri. Diskusi ini mengangkat beberapa masalah diantaranya: (i) tidak dilakukannya penanganan secara maksimal atas laporan polisi, (ii) penangkapan dan penahanan aktivis oleh Polres Nias terkait kegiatan aksi damai penyalaan lilin akibat pemadaman listrik di Nias, (iii) masyarakat berharap dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai HAM.
- d. Pembukaan Pos Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Komnas HAM yang bertempat di Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias yang beralamat di Jl. Makam Pahlawan, Desa Mudik, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli pada 26 Mei 2016. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa konsultasi dan pengaduan yang disampaikan mengenai :
- 1.1 LSM Gempita, menyampaikan tambahan berkas peristiwa penangkapan dan penahanan aktivis oleh Polres Nias terkait kegiatan aksi damai penyalaan lilin akibat pemadaman listrik di Nias. Berkas diterima dengan agenda 109.455
  - 1.2 Sdr. Zimmy Inovasi Waruwu, mengadukan mengenai ketidakprofesionalan dan kelambanan penanganan tindak pidana pembunuhan Sdr. Sokhizoya Waruwu als A. Todi Waruwu oleh Polsek Mandrehe. Berkas diterima dengan agenda 109.454
3. Pelaksanaan Kegiatan Stock Opname di Kantor Perwakilan Aceh

Pada 18 – 21 Mei 2016 Subbagian Arsip Pengaduan melaksanakan Stock Opname di Kantor Perwakilan Aceh. Tim yang bertugas terdiri Rima P Salim, Moch. Ridwan Hamzah, Teguh Suprihatin dan Topan Riyanto

#### **D. Kegiatan Lainnya**

Disamping kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan diatas, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan melaksanakan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Diskusi Bulanan

Pada 30 Mei 2016, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mengadakan kegiatan diskusi bulanan dengan tema “Perlindungan hak aksesibilitas Kelompok Disabilitas untuk mendapatkan kemudahan pelayanan sarana public berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” dengan narasumber Bpk. M. Nurkhoiron. Tema ini diangkat dilatarbelakangi bahwa kelompok penyandang disabilitas belum mendapatkan pelayanan public yang layak. Diharapkan Negara memberikan perlindungan dan kesetaraan di segala sector.

## 2. FGD Penyamaan Persepsi tentang Definisi Kasus dan Sistematika Rekomendasi Komnas HAM

Pada 23 Mei 2016, Biro Dukungan Penegakan HAM melaksanakan FGD mengenai “Penyamaan Persepsi tentang Definisi Kasus dan Sistematika Rekomendasi Komnas HAM”, dengan narasumber yaitu Ibu Lies Soegondo, BPOM, dan Bpk. Adrianus Meliala.

## E. Rencana Kegiatan Satu Bulan Ke Depan

Bersama ini disampaikan rencana kegiatan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan selama satu bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembukaan Pos Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Di Daerah Jepara pada 14- 17 Juni 2016
2. Pendekatan untuk pembukaan pos konsultasi di wilayah abu-abu Jakarta dan kampung-kampung bagi Disabel.
3. *Stock Opname* di Kantor Perwakilan Sulawesi Tangah pada 15-18 Juni 2016
4. Diskusi Bulanan membahas mengenai hukum acara pidana dengan Narsum dari pihak Hukum *Online*
5. Kerjasama dengan Dinas Sosial DKI untuk penempatan pengadu yang menginap

## F. Realiasasi Anggaran

Bersama ini dilaporkan realisasi penggunaan anggaran pada Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	NAMA AKUN	PAGU AWAL	Realisasi Mei	SISA ANGGARAN	Rencana Juni	( % )
1	5680.005.051	Pemetaan Perencanaan Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kearsipan	27,750,000	-	27,750,000	-	-
2	5680.005.052 A	Percepatan Pelayanan Pengaduan	178,803,000	111,622,000	67,181,000	-	62
3	5680.005.051 B	Konsultasi & Penerimaan Pengaduan Proaktif di Daerah	387,830,000	100,297,100	287,532,900	35,000,000	26
4	5680.005.051 C	Koordinasi Peningkatan Penanganan Kasus HAM	274,009,000	272,181,975	1,827,025	-	99
5	5680.005.053 A	Stock Opname Arsip Pengaduan	287,829,000	83,866,365	203,962,635	31,783,000	29
6	5680.005.054	Sewa Jaringan Internet dan Server SPT	428,768,000	134,088,700	294,679,300	34,999,900	31
7	5680.005.055	Evaluasi	20,127,000		20,127,000	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>1,605,116,000</b>	<b>702,056,140</b>	<b>903,059,860</b>	<b>101,782,900</b>	<b>44</b>

## **G. Hambatan**

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut didapati adanya hambatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pencairan anggaran yang cukup lama menjadi kendala bagi Tim ke lapangan untuk berhubungan dengan Pihak III misalnya pembayaran dan pemesanan tiket pesawat
2. SDM di SP3 untuk proses administrasi
3. Penggunaan ruangan pengaduan untuk kelompok bagi penggunaan kebutuhan lain tanpa ada ruang pengganti menjadi masalah ketika pengaduan membutuhkannya

## **H. Simpulan**

Berdasarkan data, fakta dan informasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di bulan Mei dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan pembukaan pos pengaduan proaktif di daerah-daerah disambut dan bahkan diminta di berbagai wilayah karena masyarakat membutuhkan hal tersebut
2. Kebutuhan pelaksanaan SO di Perwakilan memberikan bantuan pendataan dan pendokumentasian yang tepat guna untuk pengaduan di Komnas HAM.
3. Kebutuhan ruangan yang tepat guna sudah mendesak
4. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang regular masih dapat berjalan namun membutuhkan perbaikan.

## **I. Rekomendasi**

Sehubungan dengan kesimpulan sebagaimana disebutkan diatas, dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagaian Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan ini merekomendasikan kepada Sidang Paripurna sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pro Aktif lebih diperkuat di wilayah-wiyalah yang membutuhkan, termasuk wilayah Jakarta

2. Pembukaan jaringan dengan sekolah-sekolah yang mengirimkan siswanya untuk melaksanakan PKL agar magang di Komnas HAM dan memberikan bantuan kepada DPP.

#### **J. Penutup**

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 1 Juni 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**

**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**

**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA**  
**BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**  
**BULAN JUNI 2016**

**Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **870 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	6	20	Kalimantan Barat	16
2	Sumatera Utara	76	21	Kalimantan Selatan	4

3	Bengkulu	4	22	Kalimantan Tengah	6
4	Jambi	8	23	Kalimantan Timur	15
5	Riau	26	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	51	25	Gorontalo	3
7	Sumatera Selatan	24	26	Sulawesi Selatan	18
8	Lampung	9	27	Sulawesi Tenggara	12
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	28	Sulawesi Tengah	18
10	Kepulauan Riau	8	29	Sulawesi Utara	12
11	Banten	38	30	Sulawesi Selatan Barat	2
12	Jawa Barat	88	31	Maluku	19
13	DKI Jakarta	203	32	Maluku Utara	0
14	Jawa Tengah	40	33	Papua	9
15	Jawa Timur	65	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	18	35	Tanpa Alamat	25
17	Bali	17			
18	Nusa Tenggara Barat	10			
19	Nusa Tenggara Timur	14			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	445
2	Subkomisi mediasi	77
3	Tim 65	19
4	Tim KZ	2
5	File	327
Jumlah		870

**3. Jenis berkas pengaduan**

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	406
2	Tembusan	451
3	Tidak ditujukan/ ditembusukan Ke KH	13
Jumlah		870

**4. Cara penyampaian berkas**

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	73
2	Pos	723
3	Fax	21
4	Email	36
5	Audiensi	5
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	12
Jumlah		870

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	23
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
3	Hak mengembangkan diri	10
4	Hak memperoleh keadilan	322
5	Hak atas kebebasan pribadi	24
6	Hak atas rasa aman	70
7	Hak atas kesejahteraan	318
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	13
9	Hak perempuan	7
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	5
12	Non HAM	75
Jumlah		870

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	7
Lingkungan hidup	16
Jumlah	23
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
Jumlah	1
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	5
Jumlah	10

IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	245
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	24
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	41
<del>Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana</del>	11
Jumlah	321
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	2
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	12
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	0
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	2
<del>Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI</del>	5
Jumlah	24
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
<del>Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya</del>	15
<del>Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu</del>	15
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	15
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
<del>Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan</del>	21

Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	5
Jumlah	71
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	21
Hak atas kepemilikan tanah	102
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	81
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	41
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	52
Hak atas kesehatan	18
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
Jumlah	317
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0
<del>Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil</del>	0
<del>Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih</del>	0
Jumlah	0
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
<del>Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif</del>	5
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	1
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	7
<del>Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan</del>	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	20
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	2
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	3
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	4
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	77

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	440
2	Individu - Anak	8
3	Individu - Perempuan	26
4	Individu - Buruh migran	2
5	Individu - Pekerja / profesi	27
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	1
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	2
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	9
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	181

15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	59
19	Kelompok - Masyarakat adat	21
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	1
23	Kelompok - LGBT	0
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	5
28	Warga negara asing	3
29	Korporasi	6
30	Lembaga Pendidikan	3
31	Polri	1
32	Lembaga Peradilan	0
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	59

#### 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	64
2	Pemerintah daerah	110
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	16
5	Lembaga peradilan	44
6	Kepolisian	284
7	TNI	25

8	Kejaksaan	28
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	6
10	Pemerintah negara lain	3
11	Korporasi	135
12	BUMN / BUMD	43
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	13
15	Organisasi	6
16	Individu - Orang seorang	14
17	Individu - Pekerja / profesi	3
18	Kelompok Masyarakat	7
19	Kelompok Masyarakat adat	1
20	Individu - Perempuan	0
21	Kelompok Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	66

**8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kelengkapan berkas	Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
	Bukan pelanggaran	HAM	Ucapan terima kasih	
55	127	13		195

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN JULI 2016**

### **Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **318 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

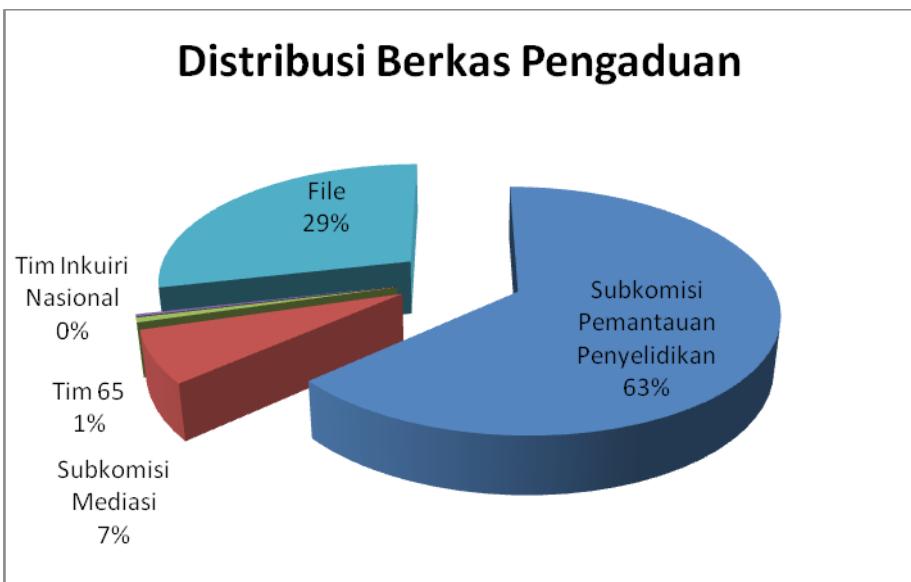
##### **1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	4	20	Kalimantan Barat	6
2	Sumatera Utara	21	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	0	22	Kalimantan Tengah	2

4	Jambi	2	23	Kalimantan Timur	7
5	Riau	6	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	23	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	6	26	Sulawesi Selatan	10
8	Lampung	8	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	28	Sulawesi Tengah	8
10	Kepulauan Riau	0	29	Sulawesi Utara	7
11	Banten	8	30	Sulawesi Selatan Barat	1
12	Jawa Barat	31	31	Maluku	14
13	DKI Jakarta	53	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	20	33	Papua	6
15	Jawa Timur	33	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	6	35	Tanpa Alamat	12
17	Bali	4			
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	5			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	202
2	Subkomisi Mediasi	22
3	Tim 65	2
4	Tim Inkuiiri Nasional	1
5	File	91
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>



### 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	143
2	Tembusan	171
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	4
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>

### 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	30
2	Pos	261
3	Fax	3
4	Email	16
5	Audiensi	3
6	Kondisi khusus / inisiatif	2
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	3
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	16
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	124
5	Hak atas kebebasan pribadi	12
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	110
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	16
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	16
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	124
5	Hak atas kebebasan pribadi	12
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	110
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	16
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>

### 5.2. Turunan hak

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	7
Jumlah	<b>16</b>
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	3
Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	1
Jumlah	<b>4</b>
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	97
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	4
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	20
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
Jumlah	<b>124</b>
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	4
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	6
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	<b>12</b>
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	5
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	9

Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	7
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	4
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	4
Jumlah	<b>30</b>
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	16
Hak atas kepemilikan tanah	29
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	24
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	9
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	18
Hak atas kesehatan	11
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	<b>110</b>
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	3
Jumlah	<b>3</b>
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
Jumlah	<b>1</b>
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>

Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	<b>2</b>
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
Jumlah	<b>0</b>
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	<b>16</b>

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	169
2	Individu - Anak	9
3	Individu - Perempuan	4
4	Individu - Buruh migran	4
5	Individu - Pekerja / profesi	8
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	71
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	15
19	Kelompok - Masyarakat hukum adat	7
20	Kelompok - Ras dan etnis	0

21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	1
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	2
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	2
29	Korporasi	1
30	Lembaga Pendidikan	1
31	Polri	0
32	Lembaga Peradilan	0
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	14

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	23
2	Pemerintah daerah	30
3	Lembaga negara (Non kementerian)	9
4	Lembaga peradilan	22
5	Kepolisian	100
6	TNI	21
7	Kejaksaan	5
8	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	4
9	Korporasi	46
10	BUMN / BUMD	13
11	Lembaga pelayanan kesehatan	3
12	Lembaga pendidikan	6
13	Individu - Orang seorang	4
14	Individu - Pekerja / profesi	2
15	Kelompok - Masyarakat	4
16	Kelompok - Teroris	1
17	Organisasi	3
18	Kelompok - Lansia	1
19	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	21

## **8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
38	84	17	139

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengaduan mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi



**LAPORAN BULANAN  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN AGUSTUS 2016**

### **Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 sampai dengan 31 Agustus 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **649 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

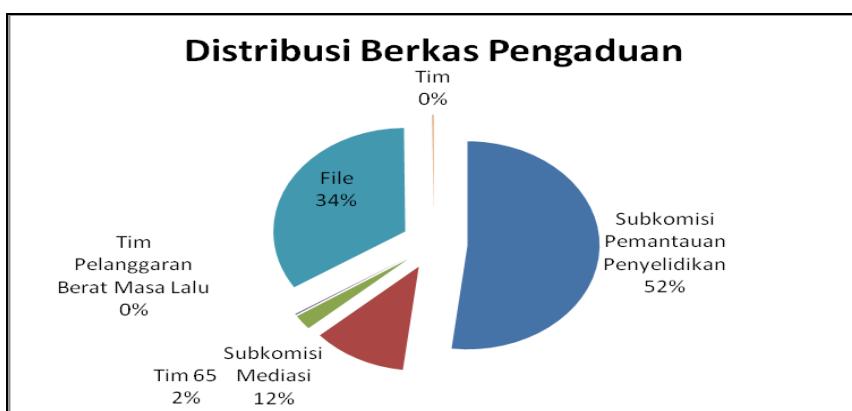
##### **1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	5	19	Nusa Tenggara Timur	11
2	Sumatera Utara	69	20	Kalimantan Barat	6
3	Bengkulu	5	21	Kalimantan Selatan	7
4	Jambi	8	22	Kalimantan Tengah	6
5	Riau	23	23	Kalimantan Timur	7

6	Sumatera Barat	51	24	Kalimantan Utara	0
7	Sumatera Selatan	15	25	Gorontalo	0
8	Lampung	1	26	Sulawesi Selatan	26
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	27	Sulawesi Tenggara	10
10	Kepulauan Riau	7	28	Sulawesi Tengah	21
11	Banten	21	29	Sulawesi Utara	5
12	Jawa Barat	60	30	Sulawesi Selatan Barat	1
13	DKI Jakarta	139	31	Maluku	13
14	Jawa Tengah	31	32	Maluku Utara	0
15	Jawa Timur	53	33	Papua	6
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	34	Papua Barat	1
17	Bali	7	35	Tanpa Alamat	11
18	Nusa Tenggara Barat	11			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	337
2	Subkomisi Mediasi	75
3	Tim 65	15
4	Tim Pelanggaran Berat Masa Lalu	1
5	File	220
6	Tim Bentukan Sidang Paripurna	1
<b>Jumlah</b>		<b>649</b>



### 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	322
2	Tembusan	322
3	Tidak ditujukan/ ditembusukan Ke KH	5
<b>Jumlah</b>		<b>649</b>

### 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	70
2	Pos	538
3	Fax	14
4	Email	18
5	Audiensi	4
6	Kondisi khusus / inisiatif	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	4
<b>Jumlah</b>		<b>649</b>

### 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	25
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	230
5	Hak atas kebebasan pribadi	18
6	Hak atas rasa aman	54
7	Hak atas kesejahteraan	246
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	4
9	Hak perempuan	6
10	Hak anak	6
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	4
12	Non HAM	51
<b>Jumlah</b>		<b>649</b>

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	7
Lingkungan hidup	18
Jumlah	<b>25</b>
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	<b>0</b>
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	4
Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	1
Jumlah	<b>5</b>
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	176
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaaan	8
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	40
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	6
Jumlah	<b>230</b>
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	10
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Mendirikan Parpol, LSM dan organisasi lainnya	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	3
Jumlah	<b>18</b>
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	7

Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	15
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	8
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	18
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	6
Jumlah	<b>54</b>
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	23
Hak atas kepemilikan tanah	94
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	51
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	21
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	41
Hak atas kesehatan	14
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
Jumlah	<b>246</b>
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2
Jumlah	<b>4</b>
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	3
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	4
Jumlah	<b>6</b>
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	4
Jumlah	<b>4</b>
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	<b>51</b>

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	313
2	Individu - Anak	10
3	Individu - Perempuan	15
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	19
6	Individu - Ras dan etnis	1
7	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
8	Individu - Narapidana	2
9	Individu - Fakir miskin	1
10	Kelompok - Masyarakat	154
11	Kelompok - Pekerja / profesi	30
12	Kelompok - Masyarakat hukum adat	15
13	Kelompok - Ras dan etnis	1
14	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	7
15	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	5
16	Kelompok - Narapidana	2
17	Organisasi	2
18	Warga negara asing	4
19	Korporasi	5
20	Lembaga Pendidikan	2
21	Pemerintah Daerah	4
22	Lembaga Negara Non Kementerian	1
23	TNI	1
24	Tidak ada/ Tanpa Nama	44

## **7. Klasifikasi pihak yang diadukan**

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	52
2	Pemerintah daerah	70
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (Non kementerian)	9
5	Lembaga peradilan	37
6	Kepolisian	199
7	TNI	28
8	Kejaksaan	16
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	4
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	100
12	BUMN / BUMD	34
13	Lembaga pelayanan kesehatan	3
14	Lembaga pendidikan	13
15	Individu - Orang seorang	19
16	Individu - Pekerja / profesi	2
17	Kelompok - Masyarakat	10
18	Kelompok - Masyarakat adat	1
19	Kelompok - Ras dan etnis	1
20	Organisasi	3
21	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	46

## **8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
31	81	15	123

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

Jakarta, 1 September 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**

**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

Rima Purnama Salim



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN SEPTEMBER 2016**

#### **Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **806 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### **1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	7	20	Kalimantan Barat	11
2	Sumatera Utara	87	21	Kalimantan Selatan	4
3	Bengkulu	4	22	Kalimantan Tengah	4
4	Jambi	11	23	Kalimantan Timur	13
5	Riau	27	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	66	25	Gorontalo	1

Laporan Bulanan Paripurna |Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

Putu Sri

021-3925230 ext 126/142

7	Sumatera Selatan	15	26	Sulawesi Selatan	32
8	Lampung	10	27	Sulawesi Tenggara	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	28	Sulawesi Tengah	19
10	Kepulauan Riau	6	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	22	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	84	31	Maluku	37
13	DKI Jakarta	185	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	34	33	Papua	7
15	Jawa Timur	47	34	Papua Barat	0
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	35	Tanpa Alamat	16
17	Bali			6	
18	Nusa Tenggara Barat			13	
19	Nusa Tenggara Timur			8	

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	462
2	Subkomisi mediasi	94
3	Tim 65	19
4	Tim KZ	0
5	File	231
Jumlah		806

## 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	365
2	Tembusan	436
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	5
Jumlah		860

## 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	66
2	Pos	711

3	Fax	12
4	Email	10
5	Audiensi	5
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	2
Jumlah		806

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	29
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	16
4	Hak memperoleh keadilan	309
5	Hak atas kebebasan pribadi	19
6	Hak atas rasa aman	73
7	Hak atas kesejahteraan	304
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	5
9	Hak perempuan	7
10	Hak anak	4
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	3
12	Non HAM	37
Jumlah		806

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	13
Lingkungan hidup	16
Jumlah	29
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	10
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	6
Jumlah	16
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	223

Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	20
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	59
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	7
Jumlah	309
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	14
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
Jumlah	19
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	15
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	14
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	17
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	15
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	11
Jumlah	73
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	21
Hak atas kepemilikan tanah	127
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	62
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	33
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	40
Hak atas kesehatan	17
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
Jumlah	304
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0

Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
Jumlah	5
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	7
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	4
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	2
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	3
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	37

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	414
2	Individu - Anak	13
3	Individu - Perempuan	18
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja / profesi	27
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	2
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - Penyandang disabilitas	0

10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
12	Individu - Lansia	2
13	Individu - Fakir miskin	1
14	Kelompok - Masyarakat	195
15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	2
18	Kelompok - Pekerja / profesi	39
19	Kelompok - Masyarakat adat	14
20	Kelompok - Ras dan etnis	3
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	14
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	0
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	4
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	1
29	Korporasi	4
30	Lembaga Pendidikan	5
31	Polri	0
32	Pemerintah Dearah	2
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	27

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	78
2	Pemerintah daerah	96
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	7
5	Lembaga peradilan	53
6	Kepolisian	251
7	TNI	46
8	Kejaksaan	29
9	Lembaga pemasarakatan dan / atau Rutan	9
10	Pemerintah negara lain	0
11	Korporasi	121
12	BUMN / BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	5
14	Lembaga pendidikan	14
15	Organisasi	4

16	Individu - Orang seorang	15
17	Individu - Pekerja / profesi	11
18	Kelompok - Masyarakat	8
19	Kelompok - Masyarakat adat	1
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	30

**8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
18	74	18	110

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

Jakarta, 3 September 2016

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**  
**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**

*Laporan Bulanan Paripurna | Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan  
Putu Sri  
021-3925230 ext 126/142*



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN OKTOBER 2016**

#### Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelasberwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

Pada 1 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 739 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	4	20	Kalimantan Barat	-
2	Sumatera Utara	71	21	Kalimantan Selatan	5
3	Bengkulu	6	22	Kalimantan Tengah	9
4	Jambi	8	23	Kalimantan Timur	12

5	Riau	25	24	Kalimantan Barat	6
6	Sumatera Barat	37	25	Gorontalo	-
7	Sumatera Selatan	26	26	Sulawesi Selatan	15
8	Lampung	14	27	Sulawesi Tenggara	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	8
10	Kepulauan Riau	5	29	Sulawesi Utara	10
11	Banten	23	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	68	31	Maluku	29
13	DKI Jakarta	182	32	Maluku Utara	-
14	Jawa Tengah	29	33	Papua	15
15	Jawa Timur	55	34	Papua Barat	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	35	Tanpa Alamat	28
17	Bali	12			
18	Nusa Tenggara Barat	14			
19	Nusa Tenggara Timur	7			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	399
2	Subkomisi mediasi	95
3	Tim 65	16
4	Tim KZ	0
5	File	229
Jumlah		739

3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	373
2	Tembusan	362
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	4
Jumlah		739

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	60
2	Pos	630
3	Fax	17
4	Email	24
5	Audiensi	6
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	2
Jumlah		739

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	20
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	9
4	Hak memperoleh keadilan	264
5	Hak atas kebebasan pribadi	16
6	Hak atas rasa aman	60
7	Hak atas kesejahteraan	301
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	10

9	Hak perempuan	4
10	Hak anak	4
1	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	49
Jumlah		739

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	11
Jumlah	20
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	6
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	2
Jumlah	8
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	203
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	10
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	47
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
Jumlah	263
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0

Kebebasan beragama dan berkeyakinan	10
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	16
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	9
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	18
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	6
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	1
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	15
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	11
Jumlah	60
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	24
Hak atas kepemilikan tanah	119
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	63
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	27
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	47

Hak atas kesehatan	17
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
Jumlah	301
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	8
Jumlah	10
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	2
Jumlah	4
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	3
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1

Jumlah	2
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	51

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	365
2	Individu - Anak	12
3	Individu - Perempuan	15
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	22
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
12	Individu - Lansia	3
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	182
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	38
19	Kelompok - Masyarakat adat	13
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	6
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0

23	Kelompok - LGBT	2
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	7
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	3
29	Korporasi	6
30	Lembaga Pendidikan	5
31	Polri	
32	Kelompok Narapidana	1
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	41

#### 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	68
2	Pemerintah daerah	103
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	8
5	Lembaga peradilan	46
6	Kepolisian	230
7	TNI	15
8	Kejaksaan	24
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	5
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	107
12	BUMN / BUMD	31
13	Lembaga pelayanan kesehatan	8
14	Lembaga pendidikan	11
15	Organisasi	5
16	Individu - Orang seorang	17

17	Individu - Pekerja / profesi	5
18	Kelompok - Masyarakat	5
19	Kelompok - Masyarakat adat	3
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	46

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Oktober 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
39	111	19	169

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Jakarta, 31 Oktober 2016  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM  
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN NOVEMBER 2016**

#### **Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 31 Oktober sampai dengan 30 November 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **597 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

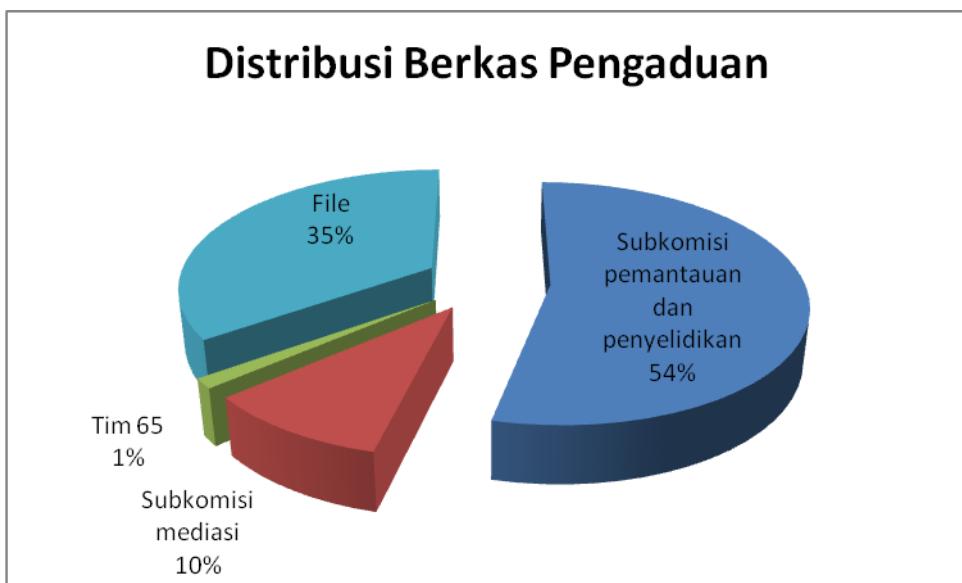
##### **1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	2	20	Kalimantan Barat	4
2	Sumatera Utara	58	21	Kalimantan Selatan	3

3	Bengkulu	5	22	Kalimantan Tengah	6
4	Jambi	3	23	Kalimantan Timur	10
5	Riau	15	24	Kalimantan Utara	3
6	Sumatera Barat	20	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	21	26	Sulawesi Selatan	20
8	Lampung	15	27	Sulawesi Tenggara	12
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	15
10	Kepulauan Riau	5	29	Sulawesi Utara	9
11	Banten	14	30	Sulawesi Selatan Barat	
12	Jawa Barat	51	31	Maluku	19
13	DKI Jakarta	148	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	27	33	Papua	6
15	Jawa Timur	53	34	Papua Barat	3
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	9	35	Tanpa Alamat	23
17	Bali	3			
18	Nusa Tenggara Barat	4			
19	Nusa Tenggara Timur	7			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	321
2	Subkomisi mediasi	60
3	Tim 65	8
4	Tim KZ	0
5	File	208
Jumlah		597



### 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	287
2	Tembusan	305
3	Tidak ditujukan/ ditembusukan Ke KH	5
Jumlah		597

### 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	58
2	Pos	503
3	Fax	13
4	Email	16
5	Audiensi	4
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	3
Jumlah		597

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	22
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	250
5	Hak atas kebebasan pribadi	21
6	Hak atas rasa aman	56
7	Hak atas kesejahteraan	188
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	3
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	42
Jumlah		597

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	13
Jumlah	22
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
Jumlah	5

IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	184
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	18
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	43
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	4
Jumlah	249
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	8
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	4
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	4
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	21
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	12
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	17
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	14

Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
Jumlah	56
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	9
Hak atas kepemilikan tanah	88
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	47
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	14
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	20
Hak atas kesehatan	7
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	188
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	6
Jumlah	8
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	0
Jumlah	2
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	2
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	3
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
Jumlah	0
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	43

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	318
2	Individu - Anak	6
3	Individu - Perempuan	10
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja / profesi	26
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Narapidana	3
14	Kelompok - Masyarakat	125

15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	1
18	Kelompok - Pekerja / profesi	30
19	Kelompok - Masyarakat adat	15
20	Kelompok - Ras dan etnis	0
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	4
29	Korporasi	4
30	Lembaga Pendidikan	1
31	Polri	0
32	Kelompok Narapidana	2
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	30

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	48
2	Pemerintah daerah	58
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	12
5	Lembaga peradilan	42
6	Kepolisian	216
7	TNI	20

8	Kejaksaan	23
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	4
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	77
12	BUMN / BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	0
14	Lembaga pendidikan	11
15	Organisasi	0
16	Individu - Orang seorang	11
17	Individu - Pekerja / profesi	7
18	Kelompok - Masyarakat	3
19	Kelompok - Masyarakat adat	0
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	35

**8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan November 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
24	73	21	118

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

**B. Penutup**

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 1 November 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**

**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**